

Implementasi Program Kampung Iklim di Desa Margagiri Kecamatan Bojonegara Kabupaten Serang

Wita Oktavia¹, Ipah Ema Jumiati²

¹⁻²Program Studi Administrasi Publik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

¹6661210028@untirta.ac.id, ²Ipah.ema@untirta.ac.id

Corresponding author: 6661210028@untirta.ac.id

Submitted: 04/05/2026; Revised: 24/06/2026; Published: 01/07/2026

DOI: <https://doi.org/10.61332/ijpa.v9i2.558>

Abstract

Climate change has encouraged the Indonesian Government to implement the Climate Village Program (ProKlim) as a community-based policy for climate change adaptation and mitigation. This study aims to analyse the implementation of ProKlim in Margagiri Village, which has received the ProKlim Utama designation. The study employed a descriptive qualitative approach. Data were collected through observation, in-depth interviews, and document review involving village officials, programme implementers, community members, and related stakeholders. Data were analysed using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldaña, consisting of data condensation, data display, and conclusion drawing. Data validity was ensured through source triangulation, technique triangulation, and member checking. The analysis used the policy implementation model of Van Meter and Van Horn, covering policy standards and objectives, resources, characteristics of implementing agencies, implementers' disposition, inter-organisational communication, and the social, economic, and political environment. The findings indicate that ProKlim implementation in Margagiri Village has generally progressed well, supported by clear programme objectives, funding from the regional budget, corporate social responsibility, and community contributions, as well as positive commitment among implementers. Nevertheless, several obstacles remain, including limited personnel, uneven community participation, overlapping roles among programme managers, underutilised public green spaces, limited academic involvement, and unequal access to information for women. The study recommends strengthening managerial capacity, optimising household yard utilisation, expanding collaboration with universities and companies, and ensuring women's meaningful participation in programme planning and decision-making.

Keywords: *Climate Change; Climate Village Program; Community Participation; Policy Implementation; ProKlim.*

Abstrak

Perubahan iklim mendorong Pemerintah Indonesia melaksanakan Program Kampung Iklim (ProKlim) sebagai kebijakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim berbasis masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi ProKlim di Desa Margagiri yang telah memperoleh predikat ProKlim Utama. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi dengan melibatkan perangkat desa, pelaksana program, masyarakat, serta pemangku kepentingan terkait. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan member check. Kerangka analisis mengacu

pada model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn yang mencakup standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik badan pelaksana, disposisi pelaksana, komunikasi antarorganisasi, serta lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi ProKlim di Desa Margagiri secara umum telah berjalan cukup baik. Pelaksanaan program didukung oleh tujuan yang jelas, pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, tanggung jawab sosial perusahaan, dan swadaya masyarakat, serta komitmen positif dari pelaksana program. Namun, masih ditemukan kendala berupa keterbatasan personel, partisipasi masyarakat yang belum merata, rangkap jabatan pengurus, ruang terbuka hijau yang belum dimanfaatkan optimal, keterlibatan akademisi yang masih terbatas, serta akses informasi perempuan yang belum setara. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas pengelola, optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan, perluasan kerja sama dengan perguruan tinggi dan perusahaan, serta pelibatan perempuan secara bermakna dalam perencanaan dan pengambilan keputusan program.

Kata kunci: Perubahan Iklim; Program Kampung Iklim; Implementasi Kebijakan; Partisipasi Masyarakat; ProKlim.

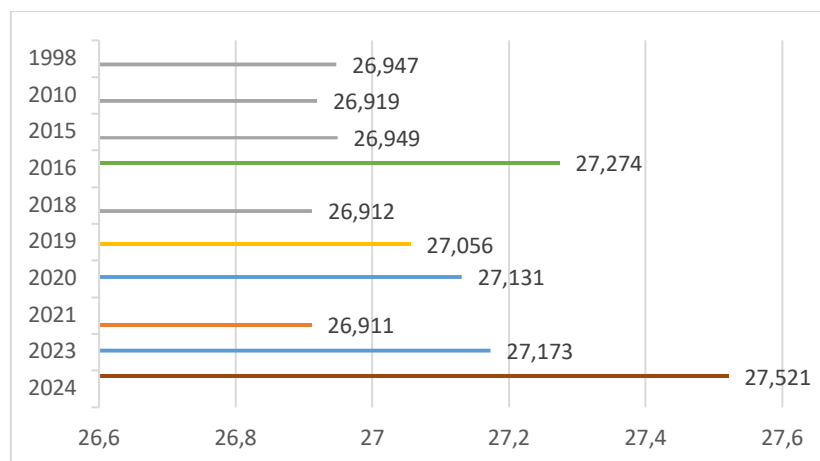
Pendahuluan

Perubahan iklim merupakan perubahan jangka panjang dalam pola suhu dan cuaca di bumi. Perubahan iklim terjadi karena adanya peningkatan konsentrasi Gas Rumah Kaca (GRK) di atmosfer, seperti karbon dioksida (CO_2), metana (CH_4), dan dinitroksida (N_2O). Gas-gas tersebut sebenarnya alami dan berfungsi menahan panas matahari agar bumi tetap hangat. Namun, akibat aktivitas manusia yang berlebihan, jumlah gas tersebut meningkat sehingga semakin banyak panas yang terperangkap di atmosfer. Emisi gas rumah kaca global pada tahun 2024 peningkatan sebesar 1,3% atau setara dengan 665 Mt $\text{CO}_{2\text{eq}}$ yaitu mencapai 53,2 Gt $\text{CO}_{2\text{eq}}$. Emisi gas rumah kaca terdiri dari CO_2 , CH_4 , N_2O dan F-gas. CO_2 fosil menyumbang 74,5% dari total emisi, CH_4 menyumbang 17,9% dari total, N_2O 4,8%, dan F-gas 2,8% (Crippa et al., 2024).

Indonesia sebagai salah satu negara dengan emisi Gas Rumah Kaca terbesar di dunia juga mengalami peningkatan emisi pada Tahun 2024. Pada tahun tersebut, total emisi mencapai 812,22 juta ton CO_2 , yang menjadikannya angka tertinggi sepanjang periode pemantauan. Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh tingginya konsumsi bahan bakar fosil dan peningkatan aktivitas industri. Sumber emisinya mencakup pembakaran batu bara mencapai 436,12 juta ton atau sekitar 53,7% dari total emisi nasional, minyak 243,18 juta ton, dan gas 99,70 juta ton serta emisi proses dari industri seperti semen sebesar 30,02 juta ton dan flaring sebesar 3,20 juta ton (Ritchie & Roser, 2025). Selain itu, sektor pertanian, kehutanan, dan limbah juga turut menyumbang peningkatan emisi CO_2 di Indonesia. Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Tahun (2024) emisi Co₂ yang dihasilkan oleh sektor pertanian, kehutanan dan limbah. Sektor pertanian mencapai 93.885,79 Gg CO₂, kehutanan 209.310,45 Gg CO₂, dan limbah 138.828,29 Gg CO₂. Jadi secara keseluruhan emisi CO₂ pada Tahun 2024 di Indonesia berdasarkan ketiga sektor tersebut mencapai 442.024,53 Gg CO₂.

Emisi gas rumah kaca tersebut menjadi pemicu terjadinya pemanasan global, yang secara langsung mendorong terjadinya perubahan iklim. Perubahan iklim memberikan dampak terhadap kehidupan manusia seperti gangguan cuaca, kenaikan muka air laut, peningkatan potensi peningkatan curah hujan yang mengakibatkan banjir dan menyebabkan kenaikan suhu permukaan Bumi (Gunawan, 2021). Pada Tahun 2024 Indonesia mengalami peningkatan suhu udara yang signifikan dan tercatat rekor terpanas dalam beberapa dekade terakhir. Berdasarkan data dari 113 stasiun-stasiun pengamatan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang tersebar di seluruh wilayah daratan Indonesia, suhu udara rata-rata nasional selama periode normal tercatat sebesar 26,7 °C, sementara suhu udara rata-rata pada tahun 2024 meningkat mencapai 27,5 °C. Hal tersebut dapat terlihat pada gambar berikut.



Gambar 1. Suhu Udara Rata-rata Indonesia (°C)
Sumber: (Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika, 2025)

Provinsi Banten sendiri merasakan dampak dari perubahan iklim yang ditandai dengan frekuensi bencana alam yang tinggi. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Banten Tahun 2025, frekuensi bencana alam yang disebabkan oleh perubahan

iklim di Tahun 2024 diantaranya yaitu: tanah longsor, cuaca ekstrem, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, serta banjir. Banjir sering kali terjadi di wilayah Kabupaten Serang sebanyak 13 kali dibandingkan dengan Kabupaten dan Kota yang ada di Provinsi Banten (BPS Provinsi banten, 2025). Selain banjir, Kabupaten Serang juga menghadapi permasalahan lainnya seperti pencemaran lingkungan akibat limbah industri yang jika tidak dikelola dengan baik dapat berdampak pada kualitas air, tanah, dan kesehatan masyarakat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Marini (2023) ditemukan bahwa terdapat perusahaan-perusahaan yang membuang limbah cair secara langsung ke aliran sungai, khususnya Sungai Ciujung, tanpa melalui Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang sesuai standar. Praktik ini menyebabkan pencemaran air yang signifikan dan menurunkan kualitas lingkungan hidup di sekitarnya.

Salah satu bentuk strategi nasional yang dirancang oleh pemerintah Indonesia dalam upaya pengurangan emisi gas rumah kaca dan dampak perubahan Iklim pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan membuat kebijakan tentang Program Kampung Iklim (ProKlim). Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 84 Tahun 2016 tentang Program Kampung Iklim, ProKlim ini merupakan program berlingkup nasional yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lain untuk melaksanakan penguatan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim dan penurunan emisi gas rumah kaca serta memberikan pengakuan terhadap upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang telah dilakukan dan dapat meningkatkan kesejahteraan di tingkat lokal sesuai dengan kondisi wilayah.

Program Kampung Iklim telah dilaksanakan di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk di Kabupaten Serang, Banten. Program Kampung Iklim yang berada di Kabupaten Serang berjumlah 24 titik lokasi yang tersebar di beberapa titik wilayah di Kabupaten Serang. Dalam implementasinya, ProKlim memiliki penilaian untuk dijadikan dasar dalam penetapan Kampung Iklim dan kategori ProKlim. Kategori dalam ProKlim diantaranya yaitu Pratama, Madya, Utama dan Lestari. Berikut merupakan data terkait lokasi berdasarkan kategori ProKlim di Kabupaten Serang.

Tabel 1. Kategori Program Kampung di Kabupaten Serang 2024

No.	Identitas Lokasi	Kategori
1	Proklim Gerakan Mandiri Sehat (GEMAS) RW 001 Desa Pelawad Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang Provinsi Banten.	Madya
2	Proklim Rw 002 Desa Sukalaba Kecamatan. Gunungsari Kabupaten Serang Provinsi Banten.	Madya
3	ProKlim RW 006 Desa Tanjungsari Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang Provinsi Banten.	Madya
4	ProKlim RW 005 Desa Tanjungsari Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang Provinsi Banten.	Madya
5	ProKlim RW 004 Desa Margagiri Kecamatan Bojonegara Kabupaten Serang.	Utama+ Trofi

Sumber : Data Primer diolah, 2025

Berdasarkan observasi awal, studi literatur dan wawancara pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti, masih terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaan Program Kampung Iklim di Desa Margagiri.

Pertama, terdapat kegiatan aksi adaptasi di RW 04 Desa Margagiri yang belum menerapkan prinsip berkelanjutan, yaitu Pemeliharaan Taman Organisasi Pemuda Marga Jaya (OPMJ) Adem. Taman seluas 320 m² tersebut dibuat sebagai ruang hijau terbuka untuk meningkatkan kualitas lingkungan, menyediakan area resapan air, sekaligus menjadi sarana rekreasi warga kini menjadi tidak terawat dan mulai ditumbuhi rumput liar.

Kedua, minimnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan Program Kampung Iklim. Pada dasarnya masalah perubahan iklim memerlukan kerja sama dan keterlibatan dari semua pihak, terutama masyarakat yang akan merasakan dampaknya secara langsung. Maka dari itu pemerintah mengajak dan melibatkan masyarakat secara aktif agar Program Kampung Iklim bisa berjalan dengan baik. Namun dalam pelaksanaan Program Kampung Iklim di Desa Margagiri sebagian masyarakat dinilai kurang berminat dalam menjalankan kegiatan Program Kampung Iklim. Jumlah penduduk laki-laki di RW 04 berjumlah 271 sedangkan yang berpartisipasi berjumlah 16 orang. Kemudian jumlah penduduk perempuan di RW 04 sebanyak 285 dan yang berpartisipasi langsung hanya 3 orang. Selebihnya, warga yang tidak ditetapkan menjadi pengurus Program Kampung Iklim di RW 04 Desa Margagiri, partisipasinya hanya berdasarkan kesukarelaan dari warga tersebut.

Ketiga, adanya rangkap jabatan dimana salah satu pengurus menjabat sebagai Bendahara sekaligus merangkap sebagai anggota Seksi Kelembagaan sehingga menyebabkan beban tugas menjadi tidak seimbang dan berpotensi menghambat efektivitas pelaksanaan fungsi masing-masing posisi. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip dasar tata kelola organisasi yang baik (*good governance*) yang mengharuskan adanya pemisahan fungsi (*segregation of duties*) untuk menjaga sistem *checks and balances* dalam organisasi. Terjadinya rangkap jabatan dalam struktur kepengurusan Program Kampung Iklim di RW 04 Desa Margagiri disebabkan oleh kurangnya pemahaman pengurus, baik terhadap Program Kampung Iklim itu sendiri maupun tugas pokok dan fungsi yang seharusnya diemban oleh masing-masing posisi dalam organisasi. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas Implementasi Program Kampung Iklim di Desa Margagiri Kecamatan Bojonegara Kabupaten Serang.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis implementasi program kampung iklim di Desa Margagiri. Pendekatan ini dipilih karena mampu mendeskripsikan dan menginterpretasikan informan secara mendalam, berbasis pada makna serta temuan lapangan sehingga data lebih aktual. Lokasi penelitian ditetapkan di Desa Margagiri dengan fokus pada efektivitas implementasi Program Kampung Iklim di Desa Margagiri Kecamatan Bojonegara Kabupaten Serang. Instrumen dari penelitian ini adalah peneliti sendiri karena hanya peneliti yang dapat terhubung dengan informan dan subjek lainnya sehingga dapat memahami dan mendalami kenyataan di lapangan. Sedangkan untuk informan penelitian terdiri Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang, pemerintahan Desa Margagiri, pengurus program kampung iklim, tokoh masyarakat dan agama, akademisi dan masyarakat.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Observasi digunakan untuk mengamati secara langsung implementasi program kampung iklim di Desa Margagiri. Wawancara dilakukan untuk menggali informasi terkait implementasi program kampung iklim, sedangkan studi dokumentasi digunakan untuk memperoleh data pendukung berupa kebijakan, laporan kegiatan, dan

dokumen terkait. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diuji melalui teknik triangulasi sumber dan teknik serta metode *member check* kepada informan penelitian guna memastikan konsistensi dan akurasi temuan penelitian

Hasil dan Pembahasan

Pembahasan ini menganalisis Implementasi Program Kampung Iklim di Desa Margagiri Kecamatan Bojonegara Kabupaten Serang dengan menggunakan kerangka teori implementasi kebijakan publik yang dikembangkan oleh Donald Van Meter dan Carl Van Horn dalam (Agustino, 2020:150) yang meliputi enam dimensi yaitu : ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik para pelaksana, sikap atau kecenderungan para pelaksana, komunikasi antar pelaksana serta dinamika sosial, ekonomi, dan politik di lingkungan eksternal.

Pertama, dimensi kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan. Tujuan ProKlim di Desa Margagiri, yaitu menciptakan lingkungan bersih dan sehat serta membangun gotong royong, dirumuskan dengan jelas dan dipahami secara seragam oleh seluruh pemangku kepentingan, mulai dari Dinas Lingkungan Hidup hingga masyarakat. Ukuran keberhasilannya pun bersifat ganda dan saling melengkapi, diukur secara formal melalui Sistem Registri Nasional (SRN) yang berhasil meraih predikat ProKlim Utama, dan secara informal dari perubahan nyata seperti lingkungan yang lebih bersih dan peningkatan ekonomi rumah tangga. Kejelasan dan realitas tujuan ini menjadi fondasi yang kuat, terbukti dengan kemampuan Kampung Dukuh untuk mereplikasi keberhasilannya ke empat kampung binaan lainnya.

Kedua, dimensi sumber daya. Implementasi ProKlim di Desa Margagiri didukung oleh tiga sumber daya yaitu sumber daya manusia, anggaran dan waktu. Pada sumber daya manusia, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang hanya memiliki 15 pegawai untuk mengawasi 326 desa di 29 kecamatan, sehingga pendampingan intensif tidak mungkin dilakukan dan Dinas harus mengandalkan kesadaran serta kemandirian masyarakat. Di Desa Margagiri ini memiliki modal sosial yang kuat, yaitu kesadaran dan semangat gotong royong, namun tantangannya adalah partisipasi aktif yang masih

terbatas dan peran organisasi masyarakat seperti karang taruna dan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang cenderung melebur menjadi masyarakat biasa. Selain itu, terjadi rangkap jabatan dalam Surat Keputusan (SK) kepengurusan yaitu bendahara merangkap sebagai anggota dari seksi kelembagaan, yang mengakibatkan beban kerja tidak seimbang, efektivitas terhambat, dan kualitas kelompok ProKlim baru mencapai 50% dari harapan. Sumber daya anggaran berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, *Corporate Social Responsibility* dari PT Indonesia Power, dan dari iuran swadaya masyarakat yang menciptakan aliran dana berkelanjutan. Sumber daya waktu dikelola secara fleksibel, di mana kegiatan ProKlim telah terintegrasi dengan rutinitas harian masyarakat, menjadikannya tidak terasa sebagai beban tambahan dan memastikan keberlanjutan program meskipun intensitas pendampingan dari dinas menurun.

Ketiga, karakteristik para pelaksana. Karakteristik agen pelaksana di tingkat desa sangat mendukung karena ProKlim merupakan kebijakan yang sejalan dengan kebiasaan masyarakat. Pengurus ProKlim dan masyarakat memiliki karakteristik yang fleksibel, kolaboratif, dan menjunjung tinggi musyawarah sebagai mekanisme pengawasan yang efektif. Dalam implementasi ProKlim di Margagiri tidak ada Standar Operasional Prosedur (SOP) formal yang digunakan dan pada pelaksanaannya ProKlim masih menghadapi batasan struktural seperti keterbatasan lahan dan polusi dari perusahaan besar, serta ketiadaan keterlibatan akademisi yang menjadi celah untuk peningkatan kapasitas.

Keempat, sikap atau kecenderungan (disposisi) para pelaksana. Sikap para pelaksana terhadap ProKlim menunjukkan penerimaan yang sangat positif. Dinas Lingkungan Hidup, pemerintah desa, dan masyarakat melihat ProKlim sebagai program yang bermanfaat dan berkelanjutan, bukan sekadar ajang lomba. Pandangan ini diperkuat oleh dukungan dari tokoh agama yang menyelaraskan ProKlim dengan ajaran Islam, serta Tim Teknis Pengelolaan Sampah yang memandang sampah sebagai sumber daya ekonomi. Sikap positif ini menjadi pendorong utama keberhasilan, berbeda dengan temuan di lokasi lain yang motivasinya menurun setelah perlombaan usai.

Kelima, komunikasi antar pelaksana. Komunikasi antar organisasi dalam implementasi ProKlim berjalan efektif dan terstruktur. Dinas Lingkungan Hidup berfungsi sebagai fasilitator yang menjembatani komunikasi antara masyarakat,

pemerintah desa, dan dinas terkait lainnya. Koordinasi diperkuat dengan pemanfaatan teknologi grup WhatsApp dan mekanisme musyawarah rutin. Keberhasilan komunikasi ini terbukti dari pencapaian ProKlim Utama dan terdaftarnya kampung binaan di Sistem Registri Nasional. Namun, akses informasi bagi masyarakat umum, terutama ibu-ibu, masih bersifat tidak langsung, yang berpotensi menimbulkan kesenjangan partisipasi.

Terakhir yaitu lingkungan ekonomi, sosial dan politik. Lingkungan eksternal di Desa Margagiri sangat kondusif bagi keberhasilan ProKlim. Secara ekonomi, masyarakat memiliki kondisi yang mapan, memungkinkan mereka untuk membayar iuran rutin dan mendapatkan manfaat ekonomi langsung dari program, seperti budidaya bunga telang. Secara sosial, budaya gotong royong yang kuat menjadi modal utama, di mana kegiatan ProKlim justru mempererat ikatan sosial warga. Namun, di balik dampak positif tersebut, seorang akademisi mengungkapkan sisi lain yang perlu diperhatikan. Menurutnya, kegiatan ProKlim terkadang berbenturan dengan rutinitas harian masyarakat. Ia mencontohkan saat sedang asyik membuat kerupuk di rumah, tiba-tiba ada kegiatan ProKlim yang memerlukan kehadirannya. Di satu sisi, ia merasa tidak enak jika tidak ikut serta, baik terhadap tetangga maupun RT. Di sisi lain, keterlibatan tersebut harus mengorbankan waktu dan pekerjaannya yang sedang berjalan. Secara politik, program ini mendapat dukungan penuh dari pemerintah desa melalui alokasi dana desa, penerbitan Surat Keputusan (SK), dan Peraturan Desa (Perdes). Sinergi yang baik antara pemerintah desa dan Dinas Lingkungan Hidup menjadi kunci keberhasilan. Meskipun demikian, pandangan kritis dari akademisi mengingatkan bahwa keberhasilan di tingkat desa tidak boleh membuat semua pihak berpuas diri, karena masih ada pekerjaan struktural yang lebih besar di tingkat kabupaten yang perlu diatasi.

Simpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Program Kampung Iklim (ProKlim) di Desa Margagiri secara umum telah berjalan cukup baik dan berhasil mencapai tujuan kebijakan. Keberhasilan ini didukung oleh kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan, yang diukur secara formal melalui Sistem Registri Nasional (SRN) dan secara informal dari perubahan perilaku masyarakat serta peningkatan ekonomi. Sumber daya yang tersedia, meskipun masih terdapat keterbatasan, dikelola secara efektif melalui

kombinasi pendanaan dari APBD, CSR, dan iuran swadaya masyarakat, serta didukung oleh pendekatan waktu yang fleksibel dan terintegrasi dengan rutinitas warga.

Karakteristik agen pelaksana yang mengedepankan fleksibilitas dan kolaborasi, serta sikap positif dari seluruh pemangku kepentingan, menjadi faktor kunci keberhasilan. Namun, implementasi masih menghadapi kendala struktural seperti keterbatasan lahan, polusi dari perusahaan besar, dan belum optimalnya peran organisasi masyarakat serta ketiadaan keterlibatan akademisi. Komunikasi antar organisasi berjalan efektif melalui musyawarah dan pemanfaatan teknologi, meskipun akses informasi bagi ibu-ibu masih terbatas pada pengumuman tanpa keterlibatan aktif dalam pengambilan keputusan. Kondisi eksternal di Desa Margagiri, yang meliputi ekonomi masyarakat yang mapan, budaya gotong royong yang kuat, dan dukungan penuh dari pemerintah desa serta Dinas Lingkungan Hidup.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan: pembinaan tugas pengurus; intensifikasi pemanfaatan lahan pekarangan; pelibatan akademisi melalui program KKN tematik; pembuatan kesepakatan dengan perusahaan terkait untuk mengurangi dampak polusi; serta mekanisme khusus untuk melibatkan ibu-ibu secara aktif dalam musyawarah dan pengambilan keputusan. Upaya-upaya ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan Program Kampung Iklim di Desa Margagiri.

Daftar Pustaka

- Agustino, L. (2020). *Dasar-dasar kebijakan publik* (2nd ed.). Alfabeta.
- Austin, T., & Marleni, M. (2021). Implementasi Program Kampung Iklim: Urban farming melalui hidroponik dan BUDIKDAMBER di Kelurahan Sialang Palembang. *Jurnal Abdimas Indonesia*, 1(3), 96–104. <https://doi.org/10.53769/jai.v1i3.128>
- Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. (2025). *Catatan iklim dan kualitas udara Indonesia* 2024. <https://iklim.bmkg.go.id/bmkgadmin/storage/buletin/Catatan%20Iklim%20dan%20Kualitas%20Udara%202024%20BMKG.pdf>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Banten. (2025, February 7). *Jumlah bencana alam menurut kabupaten/kota dan jenis bencana alam (kejadian) di Provinsi Banten tahun 2024*. <https://banten.bps.go.id/id/statistics-table/3/TUZaMGVteFVjSEJ4T1RCMIlyRjRTazVvVDJocVFUMDkjMyMzNjA/w/jumlah-bencana-alam-menurut-kabupaten-kota-dan-jenis-bencana-alam--kejadian--di-provinsi-banten.html?year=2024>
- Crippa, M., Guizzardi, D., Pagani, F., Banja, M., Muntean, M., Schaaf, E., Monforti-Ferrario, F., Becker, W. E., Quadrelli, R., Risquez Martin, A., Taghavi-Moharamli,

- P., Köykkä, J., Grassi, G., Rossi, S., Mello, J., Oom, D., Branco, A., San-Miguel, J., Manca, G., ... Pekar, F. (2024). *GHG emissions of all world countries 2024*. Publications Office of the European Union. https://edgar.jrc.ec.europa.eu/report_2024
- Furqan, M. H., Azis, D., & Wahyuni, R. (2020). Implementasi Program Kampung Iklim (ProKlim) di Gampong Lambung Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh. *Jurnal Pendidikan Geosfer*, 5(2).
- Gunawan, W. (2021). *Buku praktis Program Kampung Iklim (ProKlim)*. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten.
- Hasanah, U., Setyowati, R., & Anantanyu, S. (2022). Kemandirian masyarakat Kampung Iklim pada implementasi Program Kampung Iklim di Kelurahan Ngadirejo. *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Pertanian UNS*, 2(1), 2045. <https://proceeding.uns.ac.id/pengabdianfp/article/view/98>
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2024). *Laporan inventarisasi gas rumah kaca (GRK) dan monitoring, pelaporan, verifikasi (MPV) tahun 2024*. Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim.
- Lestarinigrum Bayu Sejati, D., Anwaruddin, & Noviko, S. (2021). Implementasi Program Kampung Iklim di Desa Karanglewas Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga. *Jurnal Dinamika Administrasi*, 18(1), 69–78. <https://doi.org/10.56681/da.v18i1.37>
- Mandala, E., Setyadiharja, R., Mukhlis, S., Usman Siam, N., & Zangki, F. (2025). Implementasi Program Kampung Iklim di Kelurahan Kampung Bugis Kota Tanjungpinang. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 6(2), 204–214. <https://doi.org/10.56552/jisipol.v6i2.256>
- Marini, I. (2023). *Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dalam menangani pembuangan limbah industri di Kabupaten Serang* [Skripsi, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa].
- Nugroho, R. (2023). *Public policy: Dinamika kebijakan publik, analisis kebijakan publik, manajemen politik kebijakan publik, etika kebijakan publik* (Y. Masda, Ed.). PT Elex Media Komputindo.
- Ritchie, H., & Roser, M. (2025). *Indonesia: CO₂ country profile*. Our World in Data. <https://ourworldindata.org/co2/country/indonesia?country=~IDN>
- Tjilen, A. P. (2019). *Konsep, teori, dan teknik analisis implementasi kebijakan publik* (F. Papilya, Ed.). Nusa Media.
- Yulia, Y. A., Awatara, I. G. P. D., Widiyanto, T., Wardhana, G. W., & Riana, D. (2024). Implementasi Program Kampung Iklim: Budi daya ikan dalam ember (BUDIKDAMBER) untuk ketahanan pangan di Desa Wonorejo, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen. *Wasana Nyata: Jurnal Pengabdian pada Masyarakat*, 8(2), 164–169. https://e-journal.stie-aub.ac.id/index.php/wasana_nyata/article/view/1873